



ISBN : 979 474 191 4
31560.9504

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT 1989 - 1993



<https://ja>

Jakarta

KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA



ISBN : 979 474 191 4
31560.9504

PENDAPATAN REGIONAL
JAKARTA BARAT
1989 - 1993



KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Publikasi "Pendapatan Regional Kotamadya Jakarta Barat Tahun 1989-1993" ini merupakan kelanjutan dari publikasi seri tahun 1989-1992, yang memuat hasil perhitungan pendapatan regional Kotamadya Jakarta Barat menurut lapangan usaha (sektor ekonomi) baik atas dasar harga berlaku maupun menurut harga konstan 1983. Beberapa perhitungan yang pada tahun sebelumnya masih bersifat sementara, dalam publikasi telah diperbaiki dan disempurnakan sehubungan dengan diperolehnya data yang lebih baru dan lebih lengkap.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terinci mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kotamadya Jakarta Barat selama kurun waktu 1989-1993, data pendapatan regional yang disajikan tidak hanya dalam bentuk agregat saja, tetapi juga dalam bentuk angka indeks dan persentase. Harapan kami, publikasi ini dapat membantu menyediakan bahan masukan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di wilayah ini.

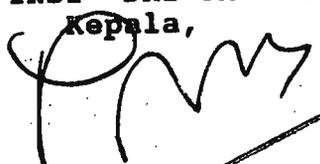
Kami menyadari hasil perhitungan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, tentu saja akan selalu diupayakan memperbaiki dan menyempurnakannya di waktu-waktu mendatang.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini

Jakarta, Februari 1995

4y **KEPALA KANTOR STATISTIK
PROPINSI DKI JAKARTA**

Kepala,


PONIMAN SUHARTONO, MA.

NIP. 340001691

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. KONSEP DAN DIFINISI	1
1.1. U m u m	1
1.2. Arti dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	2
1.2.1. Arti dan Kegunaan	2
1.2.2. Siklus Kegiatan Ekonomi	3
1.2.3. Pengertian Pendapatan Regional	4
1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional	7
1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks	9
1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan..	11
1.6. Masalah dan Keterbatasan	12
II. URAIAN SEKTORAL	15
2.1. Sektor Pertanian	15
2.1.1. Tanaman Bahan Makanan	15
2.1.2. Tanaman lainnya	16
2.1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	17
2.1.4. Perikanan	17
2.2. Sektor Industri Pengolahan	18
2.2.1. Industri Besar dan Sedang	18
2.2.2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah - tangga	19
2.3. Sektor Listrik, Gas dan Air minum	19
2.3.1. Listrik	20
2.3.2. Gas	20
2.3.3. Air minum	20
2.4. Sektor Bangunan	21

2.5	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	21
2.5.1	Perdagangan Besar dan Eceran	21
2.5.2	Hotel	22
2.5.3	Restoran	23
2.6	Sektor Angkutan dan Komunikasi	23
2.6.1	Angkutan Darat	23
2.6.2	Angkutan Laut	24
2.6.3	Angkutan Udara.....	25
2.6.4	Jasa Penunjang Angkutan	25
2.6.5	Komunikasi	26
2.7	Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ...	27
2.7.1	Bank	27
2.7.2	Asuransi	28
2.7.3	Lembaga Keuangan lainnya dan Persewaan Bangunan Bukan Tempat Tinggal	28
2.8	Sektor Sewa Rumah	29
2.9	Sektor Pemerintahan dan Pertahanan	29
2.10	Sektor Jasa-jasa.....	30
2.10.1	Jasa Perusahaan	30
2.10.2	Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	31
2.10.3	Jasa Hiburan dan Kebudayaan	31
2.10.4	Jasa Perorangan dan Rumah tangga	32
III.	TINJAUAN EKONOMI KOTAMADYA JAKARTA BARAT TAHUN 1989 - 1993	34
3.1.	Pendahuluan	34
3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat	35
3.3.	Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya	37
3.4	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per kapita	41
3.5.	Peranan PDRB Kotamadya Jakarta Barat terhadap DKI Jakarta	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah)	46
2. Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983 Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah)	47
3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	48
4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983 Menurut Lapangan Usaha	49
5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha	50
6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983 Menurut Lapangan Usaha	51
7. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	52
8. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983 Menurut Lapangan Usaha	53
9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat Menurut Lapangan Usaha	54
10. Produk Domestik Regional Bruto Jakarta Barat dan Angka-angka Per Kapita	55

I. KONSEP DAN DEFINISI

1.1. U m u m

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional, sehingga kegiatan ekonomi yang selama ini didominasi sektor primer bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Dalam menyusun perencanaan pembangunan suatu wilayah diperlukan berbagai macam data statistik, demikian pula sewaktu melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Salah satu tolok ukur yang biasanya dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah data statistik pendapatan regional yang disusun secara series.

Penghitungan Pendapatan Regional DKI Jakarta sudah dilakukan oleh Kantor Statistik sejak tahun 1969, sedangkan untuk tingkat Kotamadya baru dihitung sejak tahun 1986 dengan tahun dasar 1983. Perhitungan PDRB 1989 - 1993 ini adalah penerbitan yang ke-5, dengan demikian angka-angkanya merupakan perbaikan dari terbitan sebelumnya. Disadari hasil penghitungan ini masih banyak mengandung kelemahan, karena data yang diperlukan untuk menghitung beberapa sektor masih bersifat sementara.

1.2. Arti dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

1.2.1. Arti dan Kegunaan

Perencanaan ekonomi umumnya mempermasalahakan dua hal pokok, yaitu :

- a. Bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap.
- b. Bagaimana mengarahkan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat diterima secara adil dan merata.

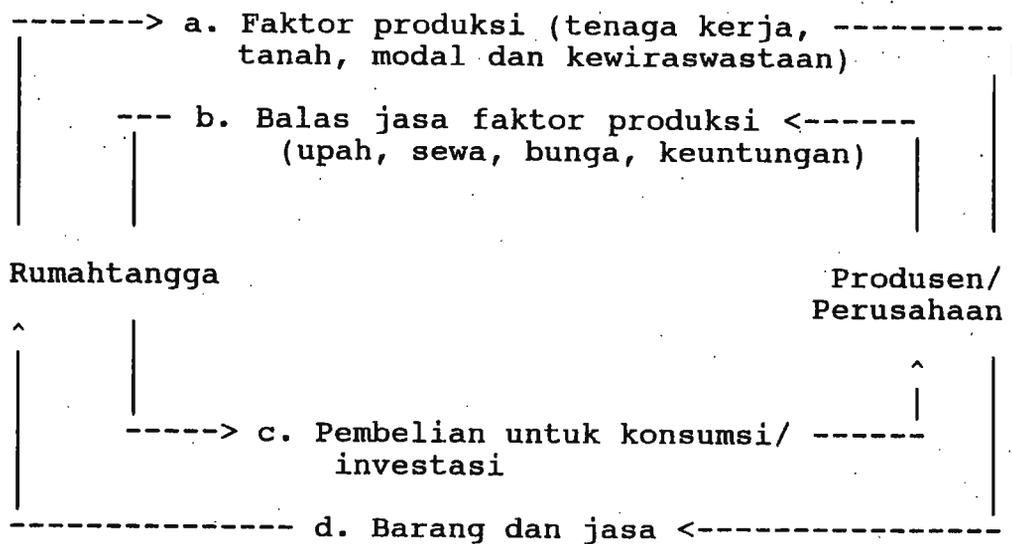
Untuk menjawab pertanyaan itu, secara kuantitatif statistik pendapatan regional dapat dipakai sebagai salah satu ukuran dan landasan yang tepat dalam perencanaan ekonomi tersebut. Statistik pendapatan regional adalah data kuantitatif yang menggambarkan besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (region) dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Manfaat statistik pendapatan regional antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional baik secara menyeluruh maupun sektoral.

- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian suatu daerah.
- c. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah baik tingkat pertumbuhannya maupun tingkat kemakmurannya dibandingkan daerah lain.
- d. Mengetahi tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah.
- e. Mengetahui potensi suatu daerah terhadap nasional baik keseluruhan maupun sektoral.

1.2.2. Siklus Kegiatan Ekonomi

Secara sederhana, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat terdiri dari kelompok yang memproduksi barang dan jasa serta kelompok yang mengkonsumsi. Untuk menghasilkan barang dan jasa kelompok produsen memerlukan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, wiraswasta) yang berasal dari konsumen (rumah tangga). Pihak konsumen akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Siklus tersebut sebagai berikut : Kelompok produsen dalam menghasilkan barang dan jasa menggunakan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, kewiraswastaan) yang berasal dari konsumen, sedangkan konsumen membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi siklus kegiatan tersebut adalah seperti berikut



1.2.3. Pengertian Pendapatan Regional

Sebelum sampai kepada pengertian sesungguhnya dari pendapatan regional, sebaiknya perlu dijelaskan secara rinci agregat-agregat dari pendapatan regional adalah sebagai berikut

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Adalah nilai bersih (produk) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Nilai bersih tersebut sebenarnya adalah balas jasa dari faktor produksi yang ikut serta dalam produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan pajak tidak

langsung neto tersebut dalam pengertian sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto, sehingga PDRB atas dasar harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor kegiatan ekonomi.

**b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)
Atas Dasar Harga Pasar**

Perbedaan konsep neto di sini dan konsep bruto pada rincian (a) adalah karena faktor penyusutan. Dalam PDRN atas dasar harga pasar, komponen penyusutan telah dikeluarkan.

**c. Produk Domestik Regional Neto
Atas Dasar Biaya Faktor**

Perbedaan konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar pada rincian (b) adalah karena faktor pajak tidak langsung neto. Dalam PDRN atas dasar biaya faktor, pajak tidak langsung neto telah dikeluarkan.

d. Produk Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan dengan konsep pada rincian (c) di atas adalah masalah domestiknya. Disebut produk domestik regional karena nilai tambah yang dihitung adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan

atas produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Sedangkan pada rincian (d), yaitu produk regional yang diperhitungkan adalah nilai tambah dari faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, baik beroperasi di dalam wilayah bersangkutan maupun beroperasi di luar wilayah. Oleh karena itu untuk sampai kepada produk regional, pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah lain harus dikeluarkan dan sebaliknya pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah bersangkutan yang berasal dari luar wilayah harus dimasukkan, yang selisihnya selanjutnya disebut sebagai faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Jadi produk regional neto atas dasar biaya faktor merupakan produk domestik regional neto ditambah faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Pengertian inilah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional.

e. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan regional.

1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Penghitungan pendapatan regional dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan (approach) :

a. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Output merupakan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan produksi dalam satu periode tertentu, sedangkan biaya antara adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses kegiatan produksi yang sedang berjalan dimana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang biasanya habis sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan yang kurang dari satu tahun. Pengeluaran atas balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara. Demikian juga pengeluaran untuk pembelian/pembuatan barang-barang modal perusahaan bukan merupakan biaya antara.

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari penjumlahan komponen-komponen nilai tambah itu sendiri. Seperti telah dijelaskan, nilai tambah bruto merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Penghitungan melalui pendekatan ini dilakukan langsung terhadap pendapatan regional, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor-impor). Kalau data yang digunakan untuk menghitung pendapatan regional dengan ketiga pendekatan ini cukup konsisten, maka hasil estimasinya tentu tidak jauh berbeda. Selain ketiga pendekatan di atas, masih ada satu metode lagi yang kadang-kadang digunakan, terutama kalau tidak ada data sama sekali yaitu metode alokasi.

d. Metode Alokasi (allocation approach)

Penghitungan nilai tambah dengan metode ini diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah nasional untuk propinsi tersebut, berdasarkan suatu indikator sebagai alokatornya.

1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara seri dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan satu tahun dasar.

- a. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun-ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan fluktuasi kenaikan harga.

Agregat-agregat pendapatan juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, laju pertumbuhan dan indeks implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks perkembangan, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.
2. Angka laju pertumbuhan, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi dengan 100. Angka ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Indeks harga implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan

Seperti telah diketahui bahwa angka-angka pendapatan atas dasar harga konstan adalah sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah produk domestik regional bruto, produk regional bruto dan pendapatan regional.

Pertumbuhan riil dari agregat ekonomi diturunkan dengan cara menghilangkan pengaruh dari perubahan harga pada angka atas dasar harga berlaku, sehingga terbentuklah angka atas dasar harga konstan. Bila angka atas dasar harga konstan dari agregat-agregat ekonomi yang berbeda dinyatakan dalam harga tahun dasar yang sama, maka analisis perbandingan akan mungkin dilakukan dan seluruh agregat tersebut bisa diturunkan dari komponen-komponennya.

Tiga metode dasar berikut adalah untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi angka atas dasar harga konstan. Metode-metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk seluruh komponen PDRB seperti permintaan akhir, output, input antara dan komponen pendapatan dari nilai tambah.

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperbarui (up dating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.

c. Deflasi

Metode ini dilakukan dengan membagi nilai masing-masing tahun dengan relatif harga yang sesuai (indeks harga x 1/100).

Metode penghitungan yang sebenarnya bisa menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut.

1.6. Masalah dan Keterbatasan

Yang menjadi masalah pokok dalam penghitungan pendapatan regional adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah/regional, agar hasil penghitungan tersebut dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan perekonomian.

Dalam penghitungan pendapatan regional beberapa masalah yang sering dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari hasil pendataan atau catatan administrasi berbagai instansi seringkali data yang tersedia untuk lingkup wilayah tidak sama dengan wilayah administrasi, sehingga pemecahan menurut wilayah/regional terbentur kepada masalah teknis penyajian/kerahasiaan data.

Contoh:

Wilayah eksploitasi PLN biasanya tidak memperhatikan batas wilayah administrasi sehingga pemecahan menurut wilayah administrasi cukup sukar.

2. Dalam suatu perusahaan yang bersifat multi regional, sistem pembukaan perusahaan biasanya dilakukan secara sentral sehingga sukar untuk diperhitungkan secara regional. Misalnya, perusahaan penerbangan, pelayaran dan sebagainya.
3. Hasil suatu sampel survei atau proyeksi biasanya direncanakan untuk kepentingan nasional. Gambaran yang diperoleh hanya sampai tingkat propinsi. Dengan demikian menjadi kurang tepat bila diturunkan untuk kotamadya.
4. Masalah lalu lintas perdagangan antara kotamadya lebih sukar diteliti dibandingkan dengan lalu lintas perdagangan antar propinsi dan antar negara. Di dalam lingkup regional ekspor dan impor akan

mencakup lalu lintas perdagangan melalui darat, antar pulau dan luar negeri. Sedangkan pada lingkup nasional hanya menyangkut perdagangan dengan luar negeri saja.

5. Masalah lain untuk penghitungan PDRB menurut kotamadya di DKI Jakarta, adalah mobilitas penduduk antar wilayah yang cukup tinggi, kegiatan produksi dan distribusi antar wilayah yang sulit dibedakan serta sangat minimnya data sosial ekonomi yang menggambarkan secara terinci dan jelas menurut wilayah kota tersebut.

Meskipun penghitungan pendapatan regional di tingkat propinsi dan kotamadya, banyak memenuhi hambatan terutama dari segi tersedianya data, namun usaha-usaha untuk tetap dapat menyajikan angka-angka pendapatan regional ini serta penyempurnaannya akan terus dilakukan. Namun demikian perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan bahwa semakin rendah unit wilayah yang akan dihitung akan semakin langka dan sulit data yang tersedia. Di samping itu keadaan perwilayahan yang semakin terbuka, menyulitkan pengumpulan datanya.

II. URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara perhitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1983, serta sumber datanya.

2.1. Sektor Pertanian.

Kegiatan pertanian di DKI Jakarta mencakup usaha tanaman bahan makanan dan tanaman hias, usaha pemeliharaan ternak serta usaha pemeliharaan ikan, penangkapan ikan dan pengambilan hasil-hasil laut. Kegiatan pertanian lainnya seperti penanaman tanaman perdagangan dan kehutanan tidak terdapat di DKI Jakarta.

2.1. 1. Tanaman Bahan Makanan.

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Data produksi diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, sedangkan data harga seluruhnya bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya di kurangi dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun bersangkutan dengan harga pada tahun 1983, kemudian dikurangkan lagi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 1983.

2.1. 2. Tanaman Lainnya.

Subsektor ini mencakup kegiatan bercocok tanam dan pengolahan tanah lainnya untuk menghasilkan jenis tanaman yang biasa di gunakan sebagai tanaman hias baik didalam pot atau lainnya maupun langsung ditanam di pekarangan atau halaman. Jenis komoditinya mencakup antara lain tanaman anggrek dan bunga anggreknya, berbagai tanaman bunga serta tanaman hias lainnya.

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian DKI Jakarta, sedangkan data harga berupa harga perdagangan besar diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1983 dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

2.1. 3. **Peternakan dan Hasil-hasilnya.**

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, telur, susu segar serta hasil pematangan hewan

Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang di potong ditambah perubahan stock populasi ternak dan ekspor ternak netto.

Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas Peternakan DKI Jakarta. Sedangkan data mengenai harga ternak diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan 1983 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan tabel input-output DKI Jakarta 1990.

2.1. 4. **P e r i k a n a n .**

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba, serta pengolahan sederhana (pengeringan dan penggaraman ikan).

Data mengenai produksi diperoleh dari Dinas Perikanan DKI Jakarta, sedangkan data mengenai harga diperoleh dari BPS.

Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1983 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sub sektor peternakan.

2.2. Sektor Industri Pengolahan.

Sektor ini terdiri dari dua subsektor, industri besar dan sedang serta kecil dan kerajinan rumah tangga.

2.2. 1. Industri Besar dan Sedang.

Ruang lingkup dan metode perhitungan nilai tambah bruto industri besar dan sedang dalam PDRB seri baru ini telah mengalami perubahan dan perbaikan sehingga terjadi perbedaan angka dengan publikasi sebelumnya.

Penghitungan output, biaya antara dan nilai tambah atas dasar harga berlaku untuk subsektor industri besar dan sedang di dasarkan pada data yang diperoleh dari survei industri besar/ sedang yang dilakukan setiap tahun oleh Biro Pusat Statistik.

Output atas dasar harga konstan 1983 dihitung secara deflasi dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang industri sebagai deflator. Jika output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku belum tersedia, maka nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan menggunakan indeks produksi sebagai ekstrapolator, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan inflator IHPB barang-barang industri.

2.2. 2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga.

Output dan nilai tambah bruto untuk industri kecil diperkirakan berdasarkan data Sensus Ekonomi 1986 dengan menggunakan pola perkembangan industri besar dan sedang menurut kode industri lima digit. Output industri kecil atas dasar harga konstan 1983 diperkirakan dengan mengalikan output tahun 1986 atas dasar harga konstan 1983 tersebut berdasar ISIC 5 digits dengan indeks produksi industri besar dan sedang. Selanjutnya dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar diperoleh pula output atas dasar harga yang berlaku.

2.3. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum.

Data produksi yang disajikan dalam publikasi ini adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Negara Gas (PN. Gas) dan Perusahaan Air Minum.

Output masing-masing subsektor mencakup semua produksi yang di hasilkan dari pelbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

2.3. 1. L i s t r i k.

Subsektor ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi listrik yang diusahakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini di peroleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Listrik Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi, dimana Indeks Tarif per KWh digunakan sebagai deflator.

2.3. 2. G a s.

Yang dicakup dalam subsektor ini adalah produksi gas dari perusahaan umum gas negara (PN. Gas). Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Gas Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.3. 3. Air Minum

Subsektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum. Data produksi, harga dan biaya-biaya yang di gunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Air Minum.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi dimana Indeks Tarif per M3 digunakan sebagai deflator.

2.4. Sektor Bangunan.

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan, fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan maupun jaringan listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. Output sektor bangunan masing-masing tahun diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input Output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi, dimana IHPB barang-barang konstruksi digunakan sebagai deflator.

2.5. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

2.5. 1. Perdagangan Besar dan Eceran.

Output perdagangan merupakan jumlah margin perdagangan yang timbul dari seluruh komoditi yang diperdagangkan, sedangkan margin perdagangan itu sendiri merupakan selisih antara nilai jual dengan nilai pembelian setelah dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang.

Output atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di peroleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input Output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Perdagangan Besar sebagai deflator.

2.5. 2. H o t e l .

Subsektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya.

Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah tempat tidur dengan output per tempat tidur. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi dengan indeks harga konsumen sebagai deflator.

2.5. 3. R e s t o r a n

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan dan penjualan makanan dan minuman jadi. Output diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi dengan IHK makanan sebagai deflator.

2.6. Sektor Angkutan dan Komunikasi.

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai & danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

2.6. 1. Angkutan Darat.

a. Angkutan Kereta Api.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Umum Kereta Api (PJKA). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983

dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi banyaknya penumpang dan barang yang diangkut.

b. Angkutan Jalan Raya.

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, truk, bemo, taksi, becak dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang yang diperoleh dari Dinas Lalulintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi masing-masing jenis angkutan jalan raya.

2.6.2. Angkutan Laut.

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Output atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan perkalian antara jumlah barang dan penumpang yang diangkut dengan rata-rata output per unit produksi, sedangkan data mengenai struktur biaya didasarkan

pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990. Data mengenai jumlah barang dan penumpang yang diangkut diperoleh dari Perum Pelabuhan II Cabang Tanjung Priok dan BPS.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 di hitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah ton barang dan penumpang yang diangkut.

2.6. 3. Angkutan Udara.

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1983 dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada angkutan laut.

2.6. 4. Jasa Penunjang Angkutan.

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan pergudangan

serta jasa penunjang lainnya. Output atas dasar harga berlaku diper kirakan dengan perkalian masing-masing unit produksi dengan rata-rata tarifnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks masing-masing unit produksi.

2.6. 5. Komunikasi.

Kegiatan yang dicakup adalah jas pos, giro dan telekomunikasi:

a. Pos dan Giro.

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti peng- iriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di dasarkan pada data produksi yang diperoleh dari Perusahaan Umum Pos dan Giro, sedangkan struktur biaya yang didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim, barang yang dipaketkan dan sebagainya.

b. Telekomunikasi.

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan-hubungan telepon, telegraf dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Telekomunikasi dan PT. Indosat.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara deflasi dengan IHPB angkutan sebagai deflator.

2.7. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Sektor ini meliputi kegiatan bank, asuransi dan lembaga keuangan lainnya serta persewaan bangunan bukan tempat tinggal.

2.7. 1. B a n k.

Angka nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari bank Indonesia.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan cara deflasi dimana angka indeks harga konsumen dan indeks harga implisit PDRB tanpa sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dipakai sebagai deflator masing-masing untuk upah & gaji dan surplus usaha.

2.7. 2. Asuransi.

Perhitungan output dan Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalokasikan output secara nasional berdasarkan peranan kegiatan asuransi di Jakarta. Demikian juga untuk biaya antara dan nilai tambahnya.

Nilai tambah bruto atas harga konstan 1983 diperoleh dengan cara deflasi dimana IHPB umum sebagai deflator.

2.7. 3. Lembaga Keuangan Lainnya dan Persewaan Bangunan Bukan Tempat Tinggal.

Besarnya output dan nilai tambah bruto lembaga keuangan lainnya diperoleh dengan menggunakan suatu persentase terhadap output dan nilai tambah bruto bank baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Perkiraan nilai output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah perusahaan real estate dengan rata-rata output perperusahaan, sedangkan biaya antara dan nilai tambah berdasarkan rasio terhadap total output. Nilai tambah atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan cara deflasi dengan menggunakan IHK perumahan sebagai deflator.

2.8. Sewa Rumah

Mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah tangga tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau rumah yang disewa.

Perkiraan output diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk dengan rata-rata output perkapita. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari rasio berdasarkan tabel input-output DKI Jakarta 1990.

Nilai tambah Bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebagai ekstrapolatornya.

2.9. Sektor Pemerintahan dan Pertahanan.

Sumbangan sektor pemerintahan dan pertahanan terhadap produk domestik regional bruto terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar 5 persen. Data yang dipakai didasarkan pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah pusat dan Hankam datanya diperoleh dengan mengalokasikan belanja pegawai nasional berdasarkan jumlah pegawai negeri pusat yang ada di DKI Jakarta serta jumlah penduduk sebagai alokatornya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri dan jumlah penduduk pertengahan tahun sebagai ekstrapolatornya .

2.10. Sektor Jasa-Jasa.

Mencakup jasa perusahaan , jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan dan rumah tangga.

2.10. 1. Jasa Perusahaan.

Meliputi jasa pengacara, jasa angkutan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan dan sebagainya. Perkiraan output didasarkan pada perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan rasio nilai tambah yang bersumber dari Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983, diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya.

2.10. 2. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan.

Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti jasa penelitian, rumah sakit, dokter praktek, panti asuhan, panti werdha, yayasan pemeliharaan anak cacat dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah murid menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua yang dirawat dan sebagainya dengan rata-rata outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku berdasarkan rasio nilai tambah terhadap output yang bersumber dari Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan perkembangan masing-masing indikator produksi sebagai ekstrapolatornya.

2.10. 3. Jasa Hiburan dan Kebudayaan.

Yang dicakup dalam subsektor ini adalah jasa bioskop, panggung kesenian, studio radio swasta, taman hiburan dan klub malam, serta produksi dan distribusi film.

Output bioskop atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Struktur biaya bersumber pada Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 dihitung dengan ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah penonton sebagai ekstrapolatornya.

Data pajak tontonan dan struktur biaya hasil survei khusus di pakai untuk memperkirakan output dan nilai tambah panggung kesenian. Nilai tambah bruto panggung kesenian atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan cara deflasi, menggunakan IHK aneka barang dan jasa sebagai deflatornya.

Output untuk produksi film diperoleh dari perkalian antara jumlah film yang diproduksi dengan rata-rata output per film, sedangkan untuk distribusi film diperoleh dari perkalian antara rasio biaya sewa film terhadap output bioskop.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1983 di lakukan dengan cara ekstrapolasi menggunakan jumlah film yang diproduksi.

2.10. 4. Jasa Perorangan dan Rumahtangga.

Subsektor ini mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa per orangan dan pembantu rumahtangga. Output untuk masing-masing kegiatan kecuali pembantu rumahtangga, diperoleh dari

perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja, sedangkan untuk pembantu rumahtangga diperoleh dari perkalian antara rata-rata pengeluaran per kapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk. Struktur biaya bersumber dari Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 1990. Nilai tambah atas dasar harga konstan 1983 diperoleh dengan cara ekstrapolasi, dengan menggunakan jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk sebagai ekstrapolatornya.

TINJAUAN EKONOMI KOTAMADYA JAKARTA BARAT 1989-1993

3.1. Pendahuluan

Kotamadya Jakarta Barat mempunyai luas wilayah 126,08 km² persegi dan sebagai daerah administratif terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan 56 kelurahan. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebelah Selatan dengan Jakarta Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan sebelah Timur dengan Kecamatan Gambir wilayah Kotamadya Jakarta Pusat Jakarta Pusat.

Berdasarkan data tofografi, wilayah ini terletak 7 m di atas permukaan laut dengan permukaan tanah yang landai, dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, yaitu Kecamatan Cengkareng dan Kalideres.

Dalam rencana pembangunan DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan Barat (WP.B), arah pembangunan bidang ekonomi didorong untuk menjadi sentra jasa, perdagangan, pemukiman dan lingkungan industri/ yang terbatas seperti tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985-2005.

Sesuai dengan letak geografis, potensi dan keadaan wilayahnya, maka struktur perekonomiannya tidak banyak terpengaruh oleh sektor pertanian, tetapi lebih banyak bertumpu pada sektor perdagangan, industri, perbankan dan sektor pengangkutan serta komunikasi. Disamping itu dengan tumbuh serta berkembangnya kawasan pemukiman baik yang dibangun oleh real estate atau developer maupun usaha penduduk yang memerlukan tempat pemukiman terlihat semakin jelas dan nyata arah pengembangan kotamadya Jakarta Barat diwaktu mendatang akan menjadi semakin penting sebagai bagian dari sentra jasa kota Jakarta.

Pada uraian berikut dicoba untuk menelaah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta Barat yang telah dicapai tahun 1993 dan selama Pelita V dibidang ekonomi, dan diharapkan akan bermanfaat dan bahan masukan dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan pembangunan Jakarta Barat pada tahap-tahap selanjutnya.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kotamadya Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Barat dengan penduduk 1,820 juta jiwa pada tahun 1990 yang lalu, mempunyai kepadatan mencapai 14 435 jiwa/km². Daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi ternyata juga memiliki aktivitas ekonomi yang juga tinggi, seperti terlihat di kecamatan Tambora, Tamansari dan Grogol Petamburan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk, antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan penduduk secara riil serta terciptanya lapangan kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Sejak beberapa tahun terakhir ini aktivitas kegiatan ekonomi di Jakarta Barat yang cukup tinggi telah memberikan dampak yang sangat positif, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1983. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jakarta Barat pada tahun 1993 adalah sebesar 8,82 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,61 persen, dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan selama Pelita V (1989-1993) sebesar 8,13 persen (Tabel A).

Wilayah Kotamadya Jakarta Barat sebagai administratif adalah bagian dari suatu sistem pemerintahan serta tata perekonomian DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana kegiatan, ditetapkan di tingkat propinsi, sehingga kebijakan mengenai perkembangan wilayah tidak hanya diteentukan oleh walikota tetapi juga diteentukan oleh pengambil keputusan di tingkat propinsi.

Dampak positif dari apa yang disebutkan di atas tadi melihat dari peran Kotamadya Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta semakin menunjukkan kondisi yang menggembirakan, hal ini tercermin dari kontribusinya yang semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada tahun 1989 baru 14,76 persen dan pada tahun 1993 naik menjadi 16,13 persen atau naik rata-rata sebesar 4,43 persen selama Pelita V berdasarkan atas harga konstan 1983.

TABEL A PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat Tahun 1989 - 1993

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB (Juta Rp)	Kenaikan (%)	PDRB (Juta Rp)	Kenaikan (%)
1989	3 183 776	22,03	2 027 532	13,07
1990	3 674 618	15,42	2 211 056	9,05
1991	4 194 522	14,15	2 367 161	7,06
1992	4 911 078	17,08	2 547 411	7,61
1993	5 710 516	16,28	2 772 139	8,82
1989-1993	-	15,73	-	8,13

Wilayah Kotamadya Jakarta Barat sebagai wilayah administratif adalah bagian dari suatu sistem dan struktur pemerintahan serta tata perekonomian DKI Jakarta, bertindak sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan di tingkat propinsi, sehingga kebijakan mengenai perkembangan wilayah tidak hanya diteentukan oleh walikota tetapi juga ditentukan oleh pengambil keputusan di tingkat propinsi.

Dampak positif dari apa yang disebutkan di atas tadi melihat dari peran Kotamadya Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta semakin menunjukkan kondisi yang mengembirakan, hal ini tercermin dari kontribusinya yang semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada tahun 1989 baru 14,76 persen dan pada tahun 1993 naik menjadi 16,13 persen atau naik rata-rata sebesar 4,43 persen selama Pelita V berdasarkan atas harga konstan 1983.

TABEL A PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat Tahun 1989 - 1993

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	PDRB (Juta Rp)	Kenaikan (%)	PDRB (Juta Rp)	Kenaikan (%)
1989	3 183 776	22,03	2 027 532	13,07
1990	3 674 618	15,42	2 211 056	9,05
1991	4 194 522	14,15	2 367 161	7,06
1992	4 911 078	17,08	2 547 411	7,61
1993	5 710 516	16,28	2 772 139	8,82
1989-1993	-	15,73	-	8,13

3.3. Perkembangan Ekonomi Sektoral dan Peranannya

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat, maka perlu dilihat perkembangan masing-masing sektornya. Ada beberapa hal yang menarik untuk diamati dari masing-masing sektor ini, terutama sektor pertanian. Pada beberapa tahun terakhir ini sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negatif, dengan kata lain sektor non pertanian makin bertambah maju, sedangkan sektor pertanian sendiri semakin mengecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah oleh penciptaan dan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti pembangunan perumahan, industri atau untuk keperluan lain, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Dengan telah dilaksanakannya intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian pada tahun 1993, sektor ini kembali mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,70 persen. Dua jenis usaha pertanian yang cukup menonjol keberhasilannya adalah usaha peternakan babi dan budidaya ikan hias.

Sektor industri pengolahan pada tahun 1993 mengalami kenaikan sebesar 18,00 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,28 persen. Sektor ini mengalami laju pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor bangunan yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,50 persen. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah pengangkutan dan komunikasi; jasa-jasa serta perdagangan, restoran dan

hotel. Beberapa sektor lainnya seperti listrik, gas dan air minum; sewa rumah serta pemerintahan dan hankam hanya mengalami pertumbuhan dibawah enam persen, sedangkan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,14 persen.

Tabel B. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 1983 Tahun 1989-1993

No.	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					1989-1993
		1989	1990	1991	1992	1993	
01.	Pertanian	0,95	(1,95)	(0,51)	(16,48)	1,70	(4,59)
02.	Industri Pengolahan	12,24	9,14	5,29	10,28	18,00	10,06
03.	Listrik, Gas dan Air						
	Minum	8,59	17,61	7,25	8,37	4,73	9,39
04.	Bangunan	8,59	20,21	14,88	23,03	21,50	19,86
05.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	1,50	8,85	8,04	6,23	6,81	7,48
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	13,43	12,57	12,11	11,18	11,28	11,79
07.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	56,63	6,83	5,60	4,08	(0,14)	4,06
08.	Sewa Rumah	5,16	4,37	3,98	3,95	3,96	4,06
09.	Pemerintahan dan Hankam	1,89	1,68	0,11	2,45	0,86	1,27
10.	Jasa-Jasa	7,97	7,61	5,63	6,05	7,28	6,64
	P D R B	13,07	9,05	7,06	7,61	8,82	8,13

Perbedaan laju pertumbuhan antar sektor menyebabkan struktur perekonomian Jakarta Barat mengalami sedikit pergeseran. Tabel C yang menyajikan peranan sektoral atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor perdagangan, seperti tahun sebelumnya, mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun 1993 sektor ini memiliki andil sebesar 27,48 persen dalam pembentukan PDRB, yang merupakan kenaikan dibanding tahun 1989 sebesar 25,87 persen.

Akibat turunnya peran sektor pertanian yang diikuti naiknya peran sektor Bangunan, angkutan dan sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel yang cukup besar maka peran sektor lainnya mengalami perubahan yang relatif kecil dibanding tahun 1989. Peranan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sedikit meningkat dari 8,35 persen pada tahun 1989 menjadi 9,56 persen pada tahun 1993. Sektor Perdagangan meningkat sumbangannya dari 25,87 persen tahun 1989 menjadi 27,48 persen, sedangkan sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya mengalami penurunan dari 20,06 persen di tahun 1989 menjadi 16,63 persen tahun 1993. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar setelah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel berturut-turut adalah sektor Industri sebesar 18,18 persen, sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebesar 16,63 persen dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,56 persen. Lima sektor lainnya mempunyai peranan kurang dari 8 (delapan) persen.

**Tabel C Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Jakarta Barat
Tahun 1989 dan 1993**

No.	S e k t o r	Harga Berlaku		Harga Konstan 1983	
		1989	1993	1989	1993
01.	Pertanian	2,79	1,61	2,41	1,46
02.	Industri Pengolahan	18,38	18,18	18,09	19,78
03.	Listrik, Gas dan Air Minum	4,06	4,64	4,09	4,28
04.	Bangunan	5,54	7,45	5,85	8,83
05.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	25,87	27,48	27,45	26,79
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	8,35	9,56	9,00	10,28
07.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	20,06	16,63	18,10	15,52
08.	Sewa Rumah	3,34	3,22	3,55	3,05
09.	Pemerintahan dan Hankam	4,35	3,66	4,74	3,64
10.	Jasa-Jasa	7,27	7,57	6,73	6,37
P D R B		100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan harga konstan 1983 (Tabel C), sektor yang mempunyai kontribusi terbesar adalah (a) sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel sebesar 26,79 persen, (b) sektor Industri Pengolahan sebesar 19,78 persen, (c) sektor Bank dan Lembaga Keuangan lain sebesar 15,52 persen, (d) sektor Bangunan sebesar 8,83 persen, dan (e) sektor Jasa-Jasa sebesar 6,37 persen.

3.4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita

Berbagai ukuran dapat dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan seperti semakin meningkatnya pendapatan penduduk, berkembangnya kegiatan ekonomi, membaiknya tingkat kesejahteraan pekerja serta terbukanya kesempatan kerja untuk tenaga kerja baru yang mencari lapangan pekerjaan.

Penghitungan pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. Penyajian yang dilakukan secara berkala baik dalam harga berlaku maupun dengan harga konstan akan menunjukkan gambaran umum mengenai peningkatan kemakmuran yang dicapai/diterima masyarakat.

Pada awal Pelita V tahun 1989 jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat tercatat 1,733 juta jiwa dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3 183 776 juta rupiah, maka PDRB per kapitanya mencapai 1,84 juta rupiah, sedangkan untuk harga konstan 1983 pada tahun yang sama PDRB per kapitanya sebesar 1,17 juta rupiah. Seiring dengan perjalanan waktu, angka per kapita ini semakin meningkat sehingga pada akhir Pelita V atau tahun 1993 jumlah ini naik menjadi 2,87 juta rupiah untuk harga berlaku dan 1,39 juta rupiah untuk harga konstan.

**TABEL D PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA JAKARTA BARAT
DAN DKI JAKARTA TAHUN 1989-1993**

INDIKATOR	TAHUN				
	1989	1990	1991	1992	1993
HARGA BERLAKU:					
a. Jakarta Barat	1 837 221	2 042 328	2 250 147	2 548 337	2 866 667
b. DKI Jakarta	2 473 172	2 787 548	3 148 786	3 624 173	4 125 336
HARGA KONSTAN 1983					
a. Jakarta Barat	1 170 002	1 228 890	1 269 861	1 321 840	1 391 608
b. DKI Jakarta	1 573 375	1 668 447	1 759 991	1 874 158	1 992 092

3.5. Peranan PDRB Kotamadya Jakarta Barat terhadap Pembentukan PDRB DKI Jakarta.

Kemajuan dan pembangunan ekonomi DKI Jakarta tentunya tidak terlepas dari kemajuan yang dicapai pada masing-masing wilayah kota. Makin berkembangnya sektor ekonomi pada suatu wilayah akan memberikan peranan yang lebih besar terhadap perkembangan sektor tersebut di DKI Jakarta dan lebih luas lagi dalam menciptakan PDRB nya.

Pelaksanaan penghitungan PDRB tahun 1993 memiliki momentum yang tepat dalam rangka menilai dan mengevaluasi kembali tentang pencapaian kemajuan sektor ekonomi di DKI Jakarta, ini bertepatan pula dengan berakhirnya Pelita V dan memasuki tahap selanjutnya (Pelita VI).

Untuk melihat peranan perekonomian Jakarta Barat terhadap perekonomian DKI Jakarta secara umum dapat dilihat dari peranan PDRB Jakarta Barat terhadap PDRB DKI Jakarta seperti yang disajikan pada Tabel E.

Pada tahun 1989 peran Kotamadya Jakarta Barat atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 16,09 persen, dengan potensi tertinggi dalam bidang pertanian sebesar 35,34 persen, ini berarti lebih dari sepertiga nilai produk pertanian DKI Jakarta berasal dari Kotamadya Jakarta Barat, posisi ini masih tetap bertahan sampai tahun 1993 dengan sumbangan sebesar 34,87 persen (turun 0,47 %). Sektor ekonomi yang perannya juga cukup besar adalah Lembaga Keuangan dan Perbankan sebesar 21,60 persen, perdagangan 20,79 persen dan sewa rumah 18,65 persen. Pada awal Pelita V sektor industri, bangunan dan pengangkutan sumbangannya cukup rendah, kurang dari 15 persen namun pada tahun-tahun berikutnya terlihat posisinya telah mengalami peningkatan dan perbaikan. Tahun 1993, tercatat tiga sektor yang memberikan andil lebih dari 18 persen dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta yaitu sektor Pertanian, Perdagangan dan Sewa Rumah. Di waktu yang sama peran sektor jasa-jasa, pemerintahan, lembaga keuangan dan perbankan menunjukkan gejala yang semakin menurun, hal ini telah mempengaruhi besarnya kontribusi PDRB Jakarta Barat secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta yaitu dari 16,09 persen pada tahun 1989 menjadi 16,04 persen pada tahun 1993.

Dilihat dari harga konstan 1983, sumbangan Kotamadya Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dari 14,76 persen pada tahun 1989 menjadi 16,13 persen pada tahun 1993. Dari Tabel E dapat dilihat bahwa peranan sektor pertanian Jakarta Barat terhadap pembentukan nilai tambah bruto sektor pertanian DKI Jakarta selama kurun waktu 1989-1993 cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat terjadi karena penurunan sektor pertanian di empat kotamadya lain lebih cepat dari pada Kotamadya Jakarta Barat. Pada tahun 1993 berdasarkan harga konstan hampir seluruh sektor menunjukkan peningkatannya, kecuali sektor Bank dan Lembaga Keuangan serta sektor Pemerintahan masing-masing turun dari 20,66 dan 16,17 persen pada tahun 1989 menjadi 17,63 persen dan 15,71 persen pada tahun 1993.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan Pemerintah bersama masyarakat di wilayah Jakarta Barat telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan kontribusi yang semakin meningkat bagi perekonomian DKI Jakarta.

Tabel E Peranan PDRB Jakarta Barat terhadap PDRB DKI Jakarta Tahun 1989 dan 1993

No.	S e k t o r	Harga Berlaku		Harga Konstan 1983	
		1989	1993	1989	1993
01.	Pertanian	35,34	34,87	29,73	36,82
02.	Industri Pengolahan	11,09	12,18	9,46	12,48
03.	Listrik, Gas dan Air Minum	16,53	16,50	15,28	15,62
04.	Bangunan	12,37	13,94	11,86	14,14
05.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	20,79	20,51	19,74	21,08
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	12,74	14,14	11,64	14,69
07.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	21,60	17,74	20,66	17,63
08.	Sewa Rumah	18,65	18,76	17,62	18,81
09.	Pemerintahan dan Hankam	17,31	15,15	16,17	15,71
10.	Jasa-Jasa	16,09	14,81	13,64	14,79
P D R B		16,09	16,04	14,76	16,13

TABEL - TABEL

<https://jakbarkota.bps.go.id/>

Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAAN	88.803	90.593	91.750	78.839	91.983
a. Tanaman Bahan Makanan	11.821	10.135	9.973	8.983	8.921
b. Tanaman Lainnya	3.713	4.273	5.012	4.807	4.734
c. Peternakan	72.879	75.785	76.289	64.554	77.736
d. Perikanan	390	400	476	495	592
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	585.086	641.176	706.319	833.104	1.038.177
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	129.136	161.466	191.086	228.872	265.021
a. Listrik	120.764	151.285	178.539	214.296	246.931
b. Gas & Air Minum	8.372	10.181	12.547	14.576	18.090
4. BANGUNAN	176.365	210.830	253.555	328.013	425.351
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	823.586	968.030	1.115.248	1.376.418	1.569.177
a. Perdagangan	737.463	868.030	999.846	1.241.284	1.413.810
b. Restoran	74.026	86.606	101.861	117.596	135.234
c. Hotel	12.097	13.394	13.541	17.538	20.133
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	265.747	315.694	389.910	454.737	545.873
a. Pengangkutan	174.096	208.360	257.814	279.967	335.765
a.1. Angk. Kereta Api	5.868	6.680	13.345	18.204	24.356
a.2. Angk. Jalan Raya	107.779	134.265	164.864	168.627	201.610
a.3. Angk. Laut	0	0	0	0	0
a.4. Angk. Udara	0	0	0	0	0
a.5. Jasa Penunjang Angk.	60.449	67.415	79.605	93.136	109.799
b. Komunikasi	91.651	107.334	132.096	174.770	210.108
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	638.791	735.692	815.480	904.297	949.678
a. Bank	519.738	596.486	661.177	733.228	743.737
b. Asuransi	119.053	139.206	154.303	171.069	205.941
8. SEWA RUMAH	106.361	120.238	138.924	155.453	183.942
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	138.449	153.587	165.470	178.866	209.255
10. JASA - JASA	231.452	277.313	326.779	372.481	432.059
a. Jasa Perusahaan	82.259	99.324	116.446	138.427	162.103
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	65.320	84.040	97.304	107.090	125.967
c. Jasa Hiburan	25.933	29.433	32.851	37.494	44.496
d. Jasa Perorangan	57.940	64.516	80.178	89.470	99.493
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.183.776	3.674.618	4.194.522	4.911.078	5.710.516

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA
(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	48.807	47.857	47.612	39.767	40.445
a. Tanaman Bahan Makanan	6.502	5.950	5.194	4.335	4.120
b. Tanaman Lainnya	1.973	2.284	2.580	2.452	2.182
c. Peternakan	40.135	39.432	39.629	32.777	33.934
d. Perikanan	197	191	209	203	209
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	366.719	400.233	421.407	464.746	548.400
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	82.871	97.465	104.535	113.280	118.642
a. Listrik	78.569	92.709	99.625	108.365	113.079
b. Gas & Air Minum	4.302	4.756	4.910	4.915	5.563
4. BANGUNAN	118.634	142.607	163.827	201.556	244.891
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	556.536	605.774	654.456	695.256	742.612
a. Perdagangan	504.993	550.501	594.934	631.151	673.564
b. Restoran	43.772	47.310	51.213	54.188	58.556
c. Hotel	7.770	7.963	8.309	9.917	10.492
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	182.438	205.373	230.240	255.988	284.875
a. Pengangkutan	131.560	148.095	160.934	168.456	184.642
a.1. Angk. Kereta Api	2.081	3.393	5.235	6.736	8.149
a.2. Angk. Jalan Raya	87.471	100.362	108.619	110.468	121.525
a.3. Angk. Laut	0	0	0	0	0
a.4. Angk. Udara	0	0	0	0	0
a.5. Jasa Penunjang Angk.	41.008	44.340	47.080	51.253	54.968
b. Komunikasi	50.878	57.278	69.306	87.532	100.233
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	366.986	392.058	414.033	430.905	430.300
a. Bank	298.629	316.623	335.691	349.389	337.021
b. Asuransi	68.357	75.435	78.342	81.516	93.279
8. SEWA RUMAH	72.073	75.220	78.210	81.297	84.517
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	96.009	97.619	97.726	100.121	100.982
10. JASA - JASA	136.459	146.850	155.115	164.494	176.475
a. Jasa Perusahaan	41.934	46.805	50.142	54.831	59.261
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	45.463	49.257	51.754	54.644	59.661
c. Jasa Hiburan	15.154	15.901	17.420	18.283	20.071
d. Jasa Perorangan	33.908	34.887	35.799	36.736	37.482
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.027.532	2.211.056	2.367.161	2.547.411	2.772.139

Tabel 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	2,79	2,47	2,19	1,61	1,61
a. Tanaman Bahan Makanan	0,37	0,28	0,24	0,18	0,16
b. Tanaman Lainnya	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08
c. Peternakan	2,29	2,06	1,82	1,31	1,36
d. Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	18,38	17,45	16,84	16,96	18,18
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	4,06	4,39	4,56	4,66	4,64
a. Listrik	3,79	4,12	4,26	4,36	4,32
b. Gas & Air Minum	0,26	0,28	0,30	0,30	0,32
4. BANGUNAN	5,54	5,74	6,04	6,68	7,45
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	25,87	26,34	26,59	28,03	27,48
a. Perdagangan	23,16	23,62	23,84	25,28	24,76
b. Restoran	2,33	2,36	2,43	2,39	2,37
c. Hotel	0,38	0,36	0,32	0,36	0,35
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8,35	8,59	9,30	9,26	9,56
a. Pengangkutan	5,47	5,67	6,15	5,70	5,88
a.1. Angk. Kereta Api	0,18	0,18	0,32	0,37	0,43
a.2. Angk. Jalan Raya	3,39	3,65	3,93	3,43	3,53
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	1,90	1,83	1,90	1,90	1,92
b. Komunikasi	2,88	2,92	3,15	3,56	3,68
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	20,06	20,02	19,44	18,41	16,63
a. Bank	16,32	16,23	15,76	14,93	13,02
b. Asuransi	3,74	3,79	3,68	3,48	3,61
8. SEWA RUMAH	3,34	3,27	3,31	3,17	3,22
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	4,35	4,18	3,94	3,64	3,66
10. JASA - JASA	7,27	7,55	7,79	7,58	7,57
a. Jasa Perusahaan	2,58	2,70	2,78	2,82	2,84
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	2,05	2,29	2,32	2,18	2,21
c. Jasa Hiburan	0,81	0,80	0,78	0,76	0,78
d. Jasa Perorangan	1,82	1,76	1,91	1,82	1,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	2,41	2,16	2,01	1,56	1,46
a. Tanaman Bahan Makanan	0,32	0,27	0,22	0,17	0,15
b. Tanaman Lainnya	0,10	0,10	0,11	0,10	0,08
c. Peternakan	1,98	1,78	1,67	1,29	1,22
d. Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	18,09	18,10	17,80	18,24	19,78
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	4,09	4,41	4,42	4,45	4,28
a. Listrik	3,88	4,19	4,21	4,25	4,08
b. Gas & Air Minum	0,21	0,22	0,21	0,19	0,20
4. BANGUNAN	5,85	6,45	6,92	7,91	8,83
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	27,45	27,40	27,65	27,29	26,79
a. Perdagangan	24,91	24,90	25,13	24,78	24,30
b. Restoran	2,16	2,14	2,16	2,13	2,11
c. Hotel	0,38	0,36	0,35	0,39	0,38
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,00	9,29	9,73	10,05	10,28
a. Pengangkutan	6,49	6,70	6,80	6,61	6,66
a.1. Angk. Kereta Api	0,10	0,15	0,22	0,26	0,29
a.2. Angk. Jalan Raya	4,31	4,54	4,59	4,34	4,38
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	2,02	2,01	1,99	2,01	1,98
b. Komunikasi	2,51	2,59	2,93	3,44	3,62
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	18,10	17,73	17,49	16,92	15,52
a. Bank	14,73	14,32	14,18	13,72	12,16
b. Asuransi	3,37	3,41	3,31	3,20	3,36
8. SEWA RUMAH	3,55	3,40	3,30	3,19	3,05
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	4,74	4,42	4,13	3,93	3,64
10. JASA - JASA	6,73	6,64	6,55	6,46	6,37
a. Jasa Perusahaan	2,07	2,12	2,12	2,15	2,14
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	2,24	2,23	2,19	2,15	2,15
c. Jasa Hiburan	0,75	0,72	0,74	0,72	0,72
d. Jasa Perorangan	1,67	1,58	1,51	1,44	1,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	120,58	102,02	101,28	85,93	116,67
a. Tanaman Bahan Makanan	100,88	85,74	98,41	90,07	99,31
b. Tanaman Lainnya	109,11	115,08	117,29	95,91	98,48
c. Peternakan	125,36	103,99	100,67	84,62	120,42
d. Perikanan	100,00	102,56	119,00	103,99	119,60
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	120,30	109,59	110,16	117,95	124,62
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	133,38	125,04	118,34	119,77	115,79
a. Listrik	134,68	125,27	118,02	120,03	115,23
b. Gas & Air Minum	117,09	121,61	123,24	116,17	124,11
4. BANGUNAN	110,19	119,54	120,27	129,37	129,68
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	103,10	117,54	115,21	123,42	114,00
a. Perdagangan	101,36	117,70	115,19	124,15	113,90
b. Restoran	123,13	116,99	117,61	115,45	115,00
c. Hotel	108,71	110,72	101,10	129,52	114,79
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	114,14	118,79	123,51	116,63	120,04
a. Pengangkutan	115,30	119,68	123,73	108,59	119,93
a.1. Angk. Kereta Api	106,42	113,84	199,78	136,40	133,80
a.2. Angk. Jalan Raya	113,60	124,57	122,79	102,28	119,56
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	119,45	111,52	118,08	117,00	117,89
b. Komunikasi	112,02	117,11	123,07	132,31	120,22
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	180,54	115,17	110,85	110,89	105,02
a. Bank	198,93	114,77	110,85	110,90	101,43
b. Asuransi	128,62	116,93	110,85	110,87	120,38
8. SEWA RUMAH	130,72	113,05	115,54	111,90	118,33
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	103,72	110,93	107,74	108,10	116,99
10. JASA - JASA	120,62	119,81	117,84	113,99	115,99
a. Jasa Perusahaan	133,55	120,74	117,24	118,88	117,10
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	121,00	128,66	115,78	110,06	117,63
c. Jasa Hiburan	110,55	113,50	111,61	114,13	118,67
d. Jasa Perorangan	109,62	111,35	124,28	111,59	111,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	122,03	115,42	114,15	117,08	116,28

Tabel 6. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	100,95	98,05	99,49	83,52	101,70
a. Tanaman Bahan Makanan	89,34	91,50	87,31	83,46	95,03
b. Tanaman Lainnya	98,31	115,76	112,96	95,04	88,99
c. Peternakan	103,32	98,25	100,50	82,71	103,53
d. Perikanan	91,20	96,95	109,42	97,13	102,96
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	112,24	109,14	105,29	110,28	118,00
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	108,59	117,61	107,25	108,37	104,73
a. Listrik	107,80	118,00	107,46	108,77	104,35
b. Gas & Air Minum	125,24	110,55	103,23	100,11	113,19
4. BANGUNAN	108,59	120,21	114,88	123,03	121,50
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	101,50	108,85	108,04	106,23	106,81
a. Perdagangan	100,64	109,01	108,07	106,09	106,72
b. Restoran	112,66	108,08	108,25	105,81	108,06
c. Hotel	101,03	102,48	104,34	119,36	105,80
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	113,43	112,57	112,11	111,18	111,28
a. Pengangkutan	114,24	112,57	108,67	104,67	109,61
a.1. Angk. Kereta Api	71,02	163,05	154,29	128,66	120,98
a.2. Angk. Jalan Raya	112,80	114,74	108,23	101,70	110,01
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	118,21	108,13	106,18	108,86	107,25
b. Komunikasi	111,40	112,58	121,00	126,30	114,51
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	156,63	106,83	105,60	104,08	99,86
a. Bank	172,59	106,03	106,02	104,08	96,46
b. Asuransi	111,57	110,35	103,85	104,05	114,43
8. SEWA RUMAH	105,16	104,37	103,98	103,95	103,96
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	101,89	101,68	100,11	102,45	100,86
10. JASA - JASA	107,97	107,61	105,63	106,05	107,28
a. Jasa Perusahaan	102,63	111,62	107,13	109,35	108,08
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	120,35	108,35	105,07	105,58	109,18
c. Jasa Hiburan	100,77	104,93	109,55	104,96	109,78
d. Jasa Perorangan	103,67	102,89	102,61	102,62	102,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,07	109,05	107,06	107,61	108,82

Tabel 7. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	189,31	193,13	195,59	168,07	196,09
a. Tanaman Bahan Makanan	90,99	78,01	76,77	69,14	68,67
b. Tanaman Lainnya	381,21	438,71	514,58	493,53	486,03
c. Peternakan	221,64	230,48	232,01	196,32	236,41
d. Perikanan	639,34	655,74	780,33	811,48	970,52
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	327,73	359,15	395,64	466,65	581,52
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	133,38	166,77	197,37	236,39	273,73
a. Listrik	257,39	322,44	380,53	456,74	526,29
b. Gas & Air Minum	516,15	627,68	773,55	898,65	1.115,28
4. BANGUNAN	207,53	248,08	298,36	385,97	500,51
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	183,14	215,26	248,00	306,07	348,94
a. Perdagangan	180,29	212,21	244,43	303,46	345,64
b. Restoran	215,96	252,66	297,16	343,06	394,52
c. Hotel	189,64	209,97	212,28	274,94	315,61
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	227,57	270,34	333,90	389,41	467,45
a. Pengangkutan	199,75	239,06	295,80	321,21	385,23
a.1. Angk. Kereta Api	148,18	168,69	337,00	459,68	615,05
a.2. Angk. Jalan Raya	211,01	262,86	322,77	330,14	394,71
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	188,19	209,88	247,83	289,95	341,83
b. Komunikasi	309,45	362,41	446,02	590,10	709,42
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	460,64	530,52	588,06	652,10	684,83
a. Bank	547,81	628,70	696,89	772,83	783,90
b. Asuransi	271,82	317,84	352,31	390,59	470,21
8. SEWA RUMAH	191,99	217,04	250,77	280,61	332,03
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	172,43	191,29	206,09	222,77	260,62
10. JASA - JASA	273,65	327,87	386,36	440,39	510,83
a. Jasa Perusahaan	335,64	405,27	475,14	564,83	661,43
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	274,49	353,15	408,89	450,02	529,34
c. Jasa Hiburan	129,81	147,33	164,44	187,69	222,74
d. Jasa Perorangan	355,53	395,88	491,98	548,99	610,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	238,90	275,74	314,75	368,52	428,51

Tabel 8. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIAN	104,05	102,02	101,50	84,78	86,22
a. Tanaman Bahan Makanan	50,05	45,79	39,98	33,37	31,71
b. Tanaman Lainnya	202,57	234,50	264,89	251,75	224,03
c. Peternakan	122,06	119,92	120,52	99,68	103,20
d. Perikanan	322,95	313,11	342,62	332,79	342,64
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	205,41	224,19	236,05	260,32	307,18
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	85,59	100,67	107,97	117,00	122,54
a. Listrik	167,46	197,59	212,33	230,96	241,01
b. Gas & Air Minum	265,23	293,22	302,70	303,03	343,00
4. BANGUNAN	139,60	167,80	192,77	237,17	288,16
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	123,76	134,71	145,53	154,60	165,13
a. Perdagangan	123,46	134,58	145,44	154,30	164,67
b. Restoran	127,70	138,02	149,41	158,08	170,83
c. Hotel	121,81	124,83	130,25	155,47	164,48
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	156,23	175,87	197,16	219,21	243,95
a. Pengangkutan	150,94	169,91	184,64	193,27	211,85
a.1. Angk. Kereta Api	52,55	85,68	132,20	170,09	205,78
a.2. Angk. Jalan Raya	171,25	196,49	212,65	216,27	237,92
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	127,67	138,04	146,57	159,56	171,13
b. Komunikasi	171,79	193,40	234,01	295,55	338,43
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	264,64	282,72	298,57	310,73	310,30
a. Bank	314,76	333,72	353,82	368,26	355,22
b. Asuransi	156,07	172,23	178,87	186,12	212,97
8. SEWA RUMAH	130,10	135,78	141,18	146,75	152,56
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	119,58	121,58	121,71	124,70	125,77
10. JASA - JASA	161,34	173,63	183,40	194,49	208,65
a. Jasa Perusahaan	171,10	190,98	204,59	223,73	241,80
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	191,05	206,99	217,48	229,63	250,71
c. Jasa Hiburan	75,86	79,60	87,20	91,52	100,47
d. Jasa Perorangan	208,06	214,07	219,66	225,42	229,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	152,14	165,91	177,63	191,15	208,02

Tabel 9. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA

LAPANGAN USAHA	1989	1990	1991	1992	1993
1. PERTANIA N	181,95	189,30	192,70	198,25	227,43
a. Tanaman Bahan Makanan	181,81	170,35	192,00	207,20	216,53
b. Tanaman Lainnya	188,19	187,08	194,26	196,04	216,95
c. Peternakan	181,58	192,19	192,51	196,95	229,08
d. Perikanan	197,97	209,42	227,75	243,84	283,25
2. INDUSTRI PENGOLAHAN	159,55	160,20	167,61	179,26	189,31
3. LISTRIK, GAS & AIR MINUM	155,83	165,67	182,80	202,04	223,38
a. Listrik	153,70	163,18	179,21	197,75	218,37
b. Gas & Air Minum	194,61	214,07	255,55	296,56	325,16
4. BANGUNAN	148,66	147,84	154,77	162,74	173,69
5. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	147,98	159,80	170,41	197,97	211,31
a. Perdagangan	146,03	157,68	168,06	196,67	209,90
b. Restoran	169,12	183,06	198,89	217,51	230,95
c. Hotel	155,69	168,20	162,98	176,85	191,88
6. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	145,66	153,72	169,35	177,64	191,62
a. Pengangkutan	132,33	140,69	160,20	166,20	181,85
a.1. Angk. Kereta Api	281,98	196,88	254,92	270,26	298,89
a.2. Angk. Jalan Raya	123,22	133,78	151,78	152,65	165,90
a.3. Angk. Laut					
a.4. Angk. Udara					
a.5. Jasa Penunjang Angk.	147,41	152,04	169,09	181,72	199,75
b. Komunikasi	180,14	187,39	190,60	199,66	209,62
7. BANK & LEMB. KEUANGAN LAIN	174,06	187,65	196,96	209,86	220,70
a. Bank	174,04	188,39	196,96	209,86	220,68
b. Asuransi	174,16	184,54	196,96	209,86	220,78
8. SEWA RUMAH	147,57	159,85	177,63	191,22	217,64
9. PEMERINTAHAN & HANKAM	144,20	157,33	169,32	178,65	207,22
10. JASA - JASA	169,61	188,84	210,67	226,44	244,83
a. Jasa Perusahaan	196,16	212,21	232,23	252,46	273,54
b. Jasa Sosial/Kemasyarakatan	143,68	170,62	188,01	195,98	211,14
c. Jasa Hiburan	171,13	185,10	188,58	205,07	221,69
d. Jasa Perorangan	170,87	184,93	223,97	243,55	265,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	157,03	166,19	177,20	192,79	206,00

Tabel 10. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAKARTA BARAT
DAN ANGKA-ANGKA PERKAPITA

U R A I A N	1989	1990	1991	1992	1993
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	3.183.776	3.674.618	4.194.522	4.911.078	5.710.516
2. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu orang)	1.733	1.799	1.864	1.927	1.992
3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Rupiah)	1.837.221	2.042.328	2.250.147	2.548.337	2.866.667
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983					
1. Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	2.027.532	2.211.056	2.367.161	2.547.411	2.772.139
2. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu orang)	1.733	1.799	1.864	1.927	1.992
3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Rupiah)	1.170.002	1.228.890	1.269.861	1.321.840	1.391.608

catatan : Angka jumlah penduduk diperbaiki dengan angka proyeksi penduduk pertengahan tahun 1990-2000.

ST

<https://jakbarkota.bps.go.id>

